

FORMAT PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Oleh: Janawi*

Abstrak: Pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah untuk tingkat SLTP dan SMU yang dituangkan ke dalam kurikulum pendidikan Nasional dilatarbelakangi oleh penyimpangan nilai-nilai moral, susila, dan norma agama. Bentuk nyata tindakan tersebut dapat dilihat melalui penyalahgunaan narkoba, tawuran di kalangan siswa, dan bentuk kriminal lain. Munculnya pendidikan budi pekerti ditanggapi oleh berbagai kalangan, bila dikomparasi dengan pendidikan agama. Terlepas dari perbedaan dan persamaan antara keduanya, pendidikan budi pekerti dianggap penting dilaksanakan. Namun, proses pembelajarannya perlu dikemas dalam format yang baru, baik melalui model *Active Learning* maupun *Quantum Learning* dan *Quantum Teaching*.

Kata kunci: Format pendidikan, budi pekerti, dan sekolah.

Pendahuluan

Dewasa ini arus globalisasi semakin merambah ke segala aspek kehidupan dunia, termasuk di Indonesia. Arus globalisasi menjadi sebuah proses yang tak dapat dielakkan. Semua orang, sadar atau tidak, berada pada kondisi global (kesejagatan), suatu era keterbukaan (*borderless world*). Dominasi era globalisasi semakin kuat dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan, baik politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Tylor, pada era ini proses ekonomi, politik, dan budaya mengalami keterkaitan supranasional (Tylor: 1997: 55). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seakan-akan menghilangkan dinding pemisah geografis yang satu dengan yang lainnya. Dalam waktu seketika, suatu peristiwa yang terjadi di belahan dunia dapat dilihat dan didengar, bahkan dampaknya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Berbagai dampak yang muncul baik bersifat positif maupun negatif menginspirasi munculnya cara pandang baru.

Salah satu refleksi dampak negatif globalisasi adalah terkikisnya nilai-nilai moral. Pelanggaran nilai-nilai moral, agama, dan susila semakin cepat. Nilai-nilai yang selama ini dianggap tabu, menjadi hal yang lumrah,

* Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, Alumni Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan spesialisasi Pemikiran Islam.

bahkan "ketabuan" nilai membuka peluang rekonstruksi format baru yang dianggap sebagai sebuah proses penisbian nilai. Fenomena ini muncul seiring dengan dampak positif era globalisasi, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Pada tahapan selanjutnya, sistem pendidikan dan hasil yang dicapai oleh dunia pendidikan selama ini dipertanyakan.

Pendiskriditan terhadap apa yang dicapai oleh institusi pendidikan semakin besar setelah munculnya berbagai pelanggaran dan perilaku remaja yang melanggar nilai-nilai moral, agama, susila, etika, dan adat. Peristiwa penyalahgunaan obat, kenakalan remaja yang cenderung mengarah pada tindak kriminal, tawuran, dan pergaulan bebas di kalangan remaja, diindikasikan sebagai bukti kegagalan sistem pendidikan kita. Masyarakat umumnya dan para orang tua khususnya mulai memperlihatkan sikap ambivalen terhadap sistem pendidikan. Seolah-olah, baik buruknya perilaku remaja terletak pada lembaga pendidikan formal (sekolah). Oleh karena itu tidak mengherankan kalau guru menjadi "kambing hitam" dari persoalan remaja. Ironisnya, apa yang terjadi, yang paling dianggap "bersalah" adalah guru agama. Bahkan, orang tua mulai menggugat kenapa pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan susila tidak menjadi materi pelajaran di sekolah. Ketidakhadiran mata pelajaran tersebut dianggap menjadi penyebab rusaknya mental remaja. Di sisi lain, kalangan agamawan menganggap, degradasi mental kalangan remaja disebabkan oleh kurangnya jumlah jam materi pendidikan agama dan ketidakmampuan guru agama dalam proses pendidikan.

Persoalan tersebut sesungguhnya diperkuat oleh dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum. Dikotomi ilmu ini pada akhirnya melahirkan dua kutub: adanya sistem "pendidikan umum" dan sistem "pendidikan agama". Kedua sistem tersebut lebih dikenal dengan "pendidikan modern", untuk yang pertama, dan "pendidikan tradisional", untuk yang kedua. Sehubungan dengan semakin gencarnya pengaruh globalisasi serta munculnya berbagai kejadian yang paradok, model-model pemikiran lama dan linear terasa tidak mampu lagi meresponi tantangan zaman. Karena itu, perlu telaah ulang tiga aliran pendidikan yang sudah dianggap final sebagai *grand theory* dalam pendidikan, yaitu *empirisme*, *nativisme*, dan *konvergensi*. Ketiga aliran ini,

secara tak langsung, dapat menginspirasi munculnya metode dan pendekatan yang akan dipakai oleh para pendidik.

Pernyataan di atas menggambarkan betapa rumitnya persoalan yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional. Jika semua persoalan tersebut diserahkan kepada dunia pendidikan dan hanya menjadi tugas dunia pendidikan, maka semua yang terjadi dan urusan anak seolah-olah hanya menjadi urusan institusi pendidikan. Padahal pembentukan watak anak tidak saja menjadi tanggung jawab para pendidik di sekolah atau para guru (termasuk guru agama), tetapi sesungguhnya tanggung jawab pembentukan watak yang pertama dan utama adalah orang tua. Secara jelas Bouwman yang dikutip Sudarsono menyatakan bahwa pengaruh orang tua terhadap anak mempunyai arti yang besar di dalam pembentukan pribadi anak (Sudarsono: 1991: 23). Persoalan di atas dapat diatasi melalui proses mensinergikan tiga komponen dasar institusi pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ketiga komponen ini tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling pengaruh mempengaruhi.

Bertitik tolak dari gambaran di atas tulisan ini mencoba menelusuri secara komprehensif realitas hasil pendidikan kalangan remaja dan mengkaji kehadiran materi pendidikan budi pekerti di sekolah. Tulisan ini akan membahas urgensi pendidikan budi pekerti, ruang lingkupnya, relevansi pendidikan budi pekerti dengan pendidikan agama, mencermati format pendidikan budi pekerti yang ada di sekolah (SLTP dan SMU), dan mencoba menawarkan format aplikasi dan pendekatan pemberian materi pendidikan budi pekerti di sekolah (SLTP dan SMU).

Pengertian Pendidikan Budi Pekerti dan Ruang Lingkupnya

Budi pekerti merupakan masalah yang rumit, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Dikatakan abstrak karena konsep budi pekerti tersebut belum terungkap secara operasional. Dalam bahasa Inggris, budi pekerti diterjemahkan sebagai *moralitas*. *Moralitas* mengandung beberapa pengertian, antara lain adat istiadat, sopan santun, dan perilaku (Sedyawati: 4). Pertanyaan yang muncul apakah budi pekerti itu merupakan adat? Apakah budi pekerti itu perilaku? Kapan dan dalam konteks apa budi pekerti tersebut dikatakan adat istiadat, sopan santun, atau pola tingkah laku? Atau apa perbedaan pendidikan budi pekerti dengan pendidikan agama? Dalam wacana

tersebut, pengertian budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Sebagai perilaku, budi pekerti meliputi pula sikap yang dicerminkan oleh perilaku (Sedyawati dkk: 4).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan Budi Pekerti berasal dari kata pendidikan dan budi pekerti. Pendidikan (bahasa Inggris: *education*) berarti "proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan; proses, perbuatan, cara mendidik" (KBBI: 1990: 204). Secara tersirat, definisi ini menggambarkan bahwa ada beberapa komponen penting dalam pendidikan, yaitu proses dan usaha sistematis, tenaga pendidik, anak didik, materi, dan tujuan. Komponen-komponen tersebut saling terkait sehingga proses perubahan sikap dan tingkah laku akan terwujud. Kemudian kata "budi" berarti "alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk" (KBBI: 131). Sedangkan akar kata "pekerti" tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. "Pekerti" adalah kata majemuk dari budi pekerti. "Budi pekerti" merupakan arti dari kata "moral" (KBBI: 592) dan "akhlak" (KBBI: 14), namun berbeda dengan kata "adab", karena "adab" yang diartikan dengan kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti (KBBI: 5), merupakan bagian dari budi pekerti.

Definisi di atas menggambarkan bahwa pendidikan budi pekerti adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilaksanakan secara sistematis oleh seseorang (pendidik) terhadap anak didik sehingga setiap perbuatan didasarkan pada akal dan budi, mampu memilah-milah antara yang patut dikerjakan dan yang tidak sesuai dengan tata nilai moral dan agama. Dalam konteks ini, pendidikan budi pekerti dijadikan sebagai anti-tesis dan sekaligus sebagai sintesis (format baru) yang akan dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Tim Penyusun/Tim Ahli "Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur", sikap dan perilaku budi pekerti mengandung lima jangkauan yaitu: *Pertama*, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam konteks ini, budi pekerti tidak mungkin menyimpang dari agama karena budi pekerti yang terjadi berdasarkan keyakinan (*belief*). Setiap orang harus kenal, ingat, berdoa, dan bertawakal kepada tuhan. *Kedua*, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri

sendiri. Setiap manusia dituntut memiliki jati diri sendiri. Dengan jati diri tersebut seseorang dapat menghargai dirinya sendiri karena ia mempunyai konsep diri yang positif. *Ketiga*, sikap dan perilaku hubungannya dengan keluarga. Seseorang tumbuh dan berkembang, bahkan bertahan (*survive*) atas dukungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, seseorang memerlukan penyesuaian diri (*adjustment*) secara harmonis dengan lingkungan di sekitarnya. *Keempat*, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa. Seseorang dapat bertahan bila mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas. Lingkungan menjadi tempat proses penyesuaian diri, sekaligus untuk mengekspresikan dirinya secara lebih luas setelah ia dewasa. *Kelima*, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Seseorang tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa adanya lingkungan yang sesuai, serasi, dan tepat seperti yang dibutuhkannya. Untuk itu, seseorang membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma tertentu yang harus dipatuhi, agar kelestarian dan keserasian dapat berlangsung (Sedyawati, dkk: 4-5).

Sifat-sifat budi pekerti luhur yang perlu ditanamkan adalah bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, beriman, berhati lembut, berinisiatif, berpikir matang, berpikiran jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersyukur, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bertenggang rasa, bijaksana, cerdas, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, bermemauan keras, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, mawas diri, menghargai jarya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, setia, sikap adil, sikap hormat, sikap tertib, sopan santun, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji, terbuka, dan ulet (Sedyawati dkk: 10-29).

Ruang lingkup pendidikan budi pekerti dilihat dari sifat-sifat di atas - bila didekatkan dengan materi yang disampaikan di SLTP dan SMU - menimbulkan perdebatan pemahaman antara pendidikan budi pekerti dengan pendidikan agama atau secara khusus pendidikan akhlak. Kalangan agamawan, khususnya institusi pendidikan agama setingkat SLTP dan SMU, mempertanyakan urgensi dan dasar kebijakan diberlakukannya bidang studi pendidikan budi pekerti. Pernyataan ini cukup mendasar bila dilihat dari materi (pokok bahasan) bidang studi Pendidikan Budi Pekerti di SLTP dan

SMU. Materi pendidikan budi pekerti yang disajikan identik dengan materi pendidikan agama dan akhlak. Bahkan referensi pokok pendidikan budi pekerti, di samping mengacu kepada buku-buku berkarakteristik umum, juga diambil dari buku-buku pendidikan agama dan akhlak. Oleh karena itu sebagian pemikir pendidikan memahami keduanya berbeda dan berdiri pada dasar filosofi yang berbeda.

Bila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Dilihat dari sisi penamaan bidang studi, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Namun dari sisi substansi keduanya *inheren* secara simbiotik. Ini berarti pendidikan budi pekerti identik dan mempunyai relevansi dengan pendidikan agama, karena materi pendidikan budi pekerti diambil dari materi pendidikan agama dan keduanya diberikan di sekolah bercirikan umum. Di sisi lain keduanya dianggap *over lapping*, karena selain pendidikan budi pekerti juga diberikan pendidikan agama. Walaupun demikian kedua bidang studi tersebut disampaikan pada posisi bidang studi yang berbeda. Pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama disampaikan pada institusi di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan sekolah-sekolah di bawah naungan Departemen Agama materi agama meliputi materi akidah akhlak, al-Qur'an dan al-Hadits, sejarah Islam, fikih, termasuk bahasa Arab. Materi-materi ini menjadi materi bidang studi agama di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SLTP) dan Madrasah Aliyah (setingkat SMU).

Salah satu penyebab munculnya dualisme materi ini tidak terlepas dari dualisme sistem pendidikan nasional. Dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam merupakan sub dari sistem pendidikan nasional. Berdasarkan filosofi dan tujuan yang berbeda antara sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan agama Islam, penawaran jumlah jam materi yang bercorak agama mengalami perbedaan besar. Pendidikan agama di SLTP hanya disajikan dua jam pelajaran (90 menit) yang mencakup semua kupasannya, baik yang berkenaan dengan persoalan keimanan (akidah), akhlak (budi pekerti), fikih, dan sejarah Islam. Sedangkan dalam sistem pendidikan Islam, materi agama diberikan dalam jumlah jam yang cukup luas, dan semuanya dikemas dalam bidang studi yang berdiri sendiri.

Terlepas dari perdebatan tersebut, tampaknya pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama di SLTP dan SMU memiliki dasar filosofi kebijakan tersendiri. Gambaran di atas memunculkan pemikiran sebagian pemikir dan perancang kurikulum, bahwa pendidikan budi pekerti tidak perlu diberikan secara berdiri sendiri. Materi pendidikan budi pekerti digabung ke dalam format pendidikan agama atau jumlah jam pendidikan agama ditambah, minimal empat jam dalam seminggu. Secara tentatif pendidikan budi pekerti telah disepakai. Meskipun keduanya terkesan menimbulkan ambiguitas, namun tujuan keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni melahirkan generasi yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik dari sisi norma, moral, maupun ajaran agama. Melalui pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama diharapkan siswa atau generasi muda (tingkat SLTP dan SMU) dan tahap berikutnya memiliki bekal hidup di tengah-tengah kosmopolitanisme budaya.

Kontribusi Pendidikan Agama dan Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti (dulu dikenal dengan istilah pendidikan susila) dipandang penting diberikan di SLTP dan SMU. Pendidikan budi pekerti tidak dianggap bertentangan dengan pendidikan agama di SLTP dan SMU. Pendidikan budi pekerti dapat dianggap sebagai cara interpretasi dan mensosialisasikan nilai-nilai moral dan ajaran agama kepada para siswa (generasi muda). Pendidikan budi pekerti merupakan sub minor dari pendidikan agama, karena materinya diambil dari pendidikan agama di SLTP dan SMU. Oleh karena itu penerapan bidang studi pendidikan budi pekerti di sekolah dimaksudkan untuk mewarnai perilaku siswa sesuai dengan tata nilai moral dan agama. Dari kerangka tersebut, penerapan pendidikan budi pekerti tidak mesti mempertahankan "adat" yang dianggap tidak sesuai dengan tata nilai yang berkembang. Walaupun demikian, nilai yang telah disepakati dan telah menjadi norma masyarakat, bahkan dianggap *established*, apakah dalam wujud *norm*, *folkways*, *adat* atau aturan-aturan lain, tetap perlu dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama.

Nilai-nilai yang telah dianggap mapan dalam suatu masyarakat, akan mungkin mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk teknologi informasi) akan menyebabkan perubahan.

besar yang dapat dirasakan adalah dalam cara pandang. Perubahan ini pada akhirnya memunculkan pergeseran nilai. Itulah sebabnya tata aturan, nilai yang selama ini dianggap telah mapan, cara kerja yang selama ini telah dianggap efektif, dapat mengalami perubahan besar. Perubahan ini terjadi pada semua komponen kehidupan.

Pendidikan budi pekerti dalam institusi pendidikan Islam identik dengan pendidikan akhlak, bahkan dapat disebut sebagai pendidikan akhlak. Dengan demikian pendidikan budi pekerti menjadi elemen penting dalam dunia pendidikan, termasuk institusi pendidikan Islam dan secara khusus dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, al-Abrasyi menegaskan bahwa pendidikan budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Untuk mencapai budi pekerti dan akhlak yang sempurna merupakan tujuan proses pendidikan (al-Abrasyi: 1970: 1). Ungkapan al-Abrasyi tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2: 1989: 7). Disinilah letaknya bahwa proses pendidikan tidak memilah-milah antara proses pendidikan yang berorientasi kepada pembentukan otak (pengisian pengetahuan) dan pembentukan budi pekerti (akhlak) yang mulia.

Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan budi pekerti di sekolah tidak terlepas dari ajaran agama. Agama menjadi *frame work* dan *original material* dari materi pendidikan budi pekerti. Agama hendaknya, menurut Madjid, berfungsi sebagai sumber terpenting kesadaran makna (*sense of meaning*) bagi umat manusia (Madjid: 1995: 575). Lebih lanjut, Baigent yang dikutip Madjid menggambarkan bahwa hilangnya kesadaran tersebut menimbulkan kekacauan epistemologis. Berbagai polemik dan permasalahan hidup muncul saling bergantian bahkan berbenturan kepentingan antara satu dengan yang lainnya (Madjid: 579-580). Pendidikan budi pekerti yang diilhami oleh ajaran agama dapat dijadikan sebagai penggerak, reaktualisasi solusi persoalan hidup dan dapat dijadikan sebagai *blue print*, pemberi makna

dalam kehidupan. Pendidikan budi pekerti terlebih agama, menjadi wacana selektif dalam membentengi proses penisbian terhadap nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut mampu mengakomodasi kepanikan epistemologis dan ketakutan, ketidakpastian semua pengetahuan, dan kemustahilan. Jika nilai ini gagal, maka makna dan pengetahuan menjadi nisbi, berubah dan bersifat sementara seperti halnya dengan apa yang terjadi selama ini.

Salah seorang pemikir dan tokoh pendidikan Mesir, Salthout menggambarkan secara jelas bahwa dalam proses pendidikan, melahirkan seseorang yang pintar lebih mudah dari pada melahirkan seseorang yang memiliki budi pekerti luhur (akhlak mulia). Bahkan tokoh pendidikan Islam sepakat, pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi mendidik akhlak dan jiwa mereka, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk hidup dengan hati yang ikhlas dan jujur. Tujuan pokok pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa (al-Abrasyi: 1).

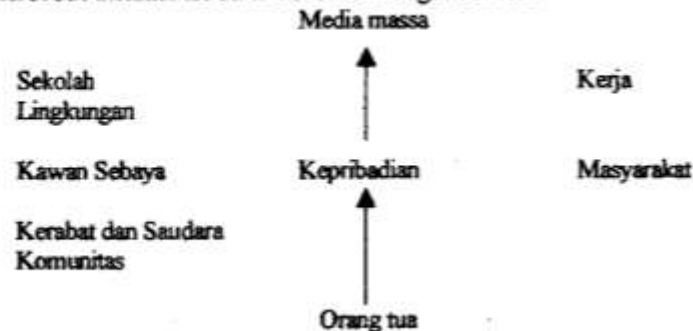
Dalam realitas bangsa Indonesia, penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah dianggap sebagai reformulasi nilai yang selama ini dianggap telah kabur atau masyarakat telah meninggalkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Masyarakat hanyut dalam hegemoni dunia modern yang ditandai dengan kecenderungan yang berlebihan terhadap materialistik. Hegemoni budaya, menurut Madjid, menimbulkan pergeseran dalam hirarki nilai, yang mendorong tidak saja penisbian beberapa nilai hidup tertentu tetapi juga sebaliknya, pemutlakan beberapa nilai hidup lainnya, telah menjadi salah satu titik sentral pembahasan di dunia modern (Madjid: 575). Intinya proses pembelajaran di sekolah perlu reaktualisasi nilai-nilai budaya dan transendensi spiritual dalam proses transformasi.

Pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama disampaikan di sekolah sebagai upaya membangun sumber daya manusia (*achievement motivation*). Pendidikan, selain memperhatikan aspek fisik, juga dianggap penting memperhitungkan aspek *human values*. Celland dalam Tjokrowinoto (2001: 48), menegaskan dimensi kepribadian manusia dapat berkembang berdasarkan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Selanjutnya, Hagen (1962) mengulas faktor makro individual, kepribadian, berperan besar sebagai

determinan keberhasilan membangun sumber daya manusia. Pada pembentukan kepribadian, ada empat aspek yang paling menentukan kepribadian yaitu inteligensi dan energi, orientasi nilai, kognisi, dan kebutuhan (*needs*) (Tjokrowinoto: 51). Bahkan pengembangan kepribadian melalui peningkatan kualitas religiusitas, kreativitas, dan ketahanan mental, menjadi acuan transformatif. Atau lebih spesifik, pengembangan aspek-aspek kepribadian diletakkan dalam konteks religiusitas dan moralitas. Acuan ini dikembangkan untuk menahan laju fanatisme nilai materialisme dan hedonisme.

Agaknya, cendekiawan sependapat bahwa pribadi dan perilaku manusia terbentuk melalui *nature* (unsur genetika biologis) dan *nurture* (unsur pola asuh). Lebih rinci dapat dikatakan bahwa perkembangan kepribadian, adalah fungsi, genetika, dan stimulasi, lingkungan, yang terjadi pada kurun waktu tertentu, dan akan menghasilkan perubahan pada *organisme*, dan perilaku. Perkembangan kepribadian secara diakronis akan memberikan pengaruh pada tahap perkembangan kepribadian pribadinya sejak periode pre natal sampai dewasa.

Perkembangan kepribadian dan pembentukan perilaku tergantung pada *setting* pengaruh *milleu*. Orang tua dan keluarga merupakan *key formative influence*. Pada perkembangan selanjutnya pengaruh akan muncul dari lingkungannya, baik tenaga pendidik, teman sebaya (*peers*) maupun komunitas masyarakat secara umum. Perilaku anak, perkembangan emosional, daya kritis, pengembangan kemampuan intelektual (*cultivation of intellectual power*), sebagai imbas dari lingkungan dimana seseorang dibesarkan (Pikun: 387). Realitas tersebut dilukiskan dalam skema sebagai berikut:



Format Pendidikan Budi Pekerti.

Sejak pendidikan budi pekerti ditetapkan sebagai bidang studi di tingkat SLTP dan SMU, berbagai kalangan khususnya masyarakat dan para orang tua menyambut dengan rasa gembira. Karena pendidikan budi pekerti menjadi paradigma baru dan menjadi langkah alternatif reaktualisasi nilai-nilai moral para siswa (remaja). Untuk itu, pendidikan budi pekerti harus diformat secara komprehensif, baik dari segi materi, pendekatan yang akan digunakan, metode, dan faktor pendukung lainnya. Pelaksanaannya perlu memperhatikan segala unsur dan menghindari sikap tergesa-gesa.

Pendidikan budi pekerti, sebagaimana fungsi agama, hendaknya dapat berfungsi edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial (*social control*), memupuk persaudaraan, dan transformatif (Hendropuspito: 1990: 38-55). *Pertama*, fungsi edukatif. Agama dan budi pekerti memberikan pengajaran yang bersifat otoritatif melalui pendekatan bimbingan persuasif dan aksi. *Kedua*, fungsi penyelamatan. Nilai-nilai sakral (*spiritual transendensi*) dan moral, norma, aturan-aturan kemaslahatan umat manusia, dijadikan sebagai bingkai dan tambatan kehidupan. *Ketiga*, fungsi pengawasan sosial. Keyakinan dan nilai-nilai luhur menjadi sumber moral dan penyeleksi aturan-aturan yang kontradiktif. *Keempat*, fungsi memupuk persaudaraan. Perbedaan agama adalah lumrah. Perbedaan tidak menjadi motor konflik, jika nilai-nilai yang berlaku disepakati dan dipegang teguh akan melahirkan kebersamaan dan persaudaraan (baik dalam makna sempit sesama penganut agama maupun dalam arti luas antar penganut satu agama dengan yang lainnya). *Kelima*, berfungsi transformatif. Budi pekerti yang diinspirasi oleh ajaran agama dijadikan sebagai "pengubah" akal budi menjadi luhur.

Dari fungsi-fungsi di atas pendidikan budi pekerti menjadi *barometer* keberhasilan pembentuk watak. Dalam beberapa penelitian di Indonesia maupun belahan dunia, Colorado, AS menggambarkan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diberikan dan diterima seseorang. Nilai-nilai (informasi) yang ditawarkan bersentuhan dengan otak. Healy misalnya, menulis dalam *New Brain, New School* "otak manusia dapat diubah oleh apa yang masuk ke dalamnya, sehingga mengalami sesuatu yang awal akan mengakibatkan perbedaan dalam pembentukan sel-sel otak" (Healy: 2000: 2).

Selanjutnya, Sylvester dalam artikelnya "Kepemimpinan Pendidikan" (1997) dengan judul "The Neurobiology of Self-Esteem and Agression" melukiskan apa yang dilakukan seseorang akan mengacu kepada pembentukan perilaku. Ia berpendapat bahwa perkembangan dan perubahan perilaku berkaitan dengan *neurotransmitter serotonin*. Pertambahan tingkat serotonin berkaitan dengan harga diri dan status sosial yang tinggi, dan penurunan tingkat serotonin berkaitan dengan harga diri dan tingkat sosial yang rendah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tingkat serotonin yang rendah mengakibatkan sifat lekas marah (iritabilitas) yang selanjutnya mengakibatkan perilaku impulsif, tidak terkontrol, sembrono, agresif, garang, dan merusak diri. Salah satu contoh, seorang anak yang melewatkan banyak waktu untuk menonton televisi di usia dini dapat membentuk perilaku tidak berdaya, terlalu agresif atau pasif.

Munculnya segala bentuk penyimpangan seperti tawuran di kalangan pelajar dan tindak kriminal lainnya, menurut hasil penelitian dari *Educational World* (2000) tidak terlepas dari perubahan fisik otak seseorang. Penelitian tersebut menghubungkan antara perilaku dengan perubahan fisik pada otak. Menurutnya, sejarah *neural* kita ditemukan pada pengaruh timbal balik yang dinamis antara sifat dan penguasaan. Pengaruh timbal balik yang mempengaruhi perkembangan otak tersebut diantaranya yakni: para pelajar masa kecilnya terlalu banyak melewatkan waktu di mobil dan tidak melewatkan waktu untuk bermain, kurang memiliki kesiapan untuk menghadapi sekolah, adanya ancaman yang terus menerus dan trauma awal yang dialaminya, dan kurang melakukan aktifitas yang beragam di usia dini.

Peristiwa masa lalu berimbas pada otak dan perilaku masa berikutnya. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, penguasaan dengan pengenalan nilai-nilai (budi pekerti) menjadi solusi. Budi pekerti tidak hanya diperkenalkan di lingkungan sekolah saja tetapi juga di rumah, meskipun dalam istilah yang berbeda. Mengutip laporan "Carnegie Corporation betema "Starting Point", Ronald Kotulak dalam *Learning How to Use the Brain*, tiga tahun pertama dalam kehidupan anak merupakan masa terpenting bagi perkembangan otak. Sayangnya, bagi sejumlah anak, perkembangan mental mereka dalam tiga tahun pertama kehidupannya tidak diperhatikan. Untuk membendung epidemi kekerasan yang terus berkembang, para pendidik dan

orang harus memberikan stimulasi secara seimbang antara stimulasi emosional dan intlegensi.

Di Indonesia, tawuran sepertinya telah menjadi langganan ketidakperdulian siswa terhadap diri dan lingkungannya. Menurut catatan Polda metrojaya melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat, tawuran menunjukkan gejala yang berfluktuasi sejak tahun 1998-2001. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Frekuensi Tawuran di Indonesia Tahun 1998-2001

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	MENINGGAL	DIRAWAT	DIPROSES
1	1998	230	15	1768	80
2	1999	193	32	1142	141
3	2000	197	28	1367	157
4	2001	123	23	379	122

Sumber: *Suara Pembaharuan* tanggal 12 Januari 2002

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dari tahun 1998-2001 terjadi penurunan aksi tawuran yang signifikan di kalangan pelajar. Walaupun frekwensi tawuran tahun 2000 cenderung bertambah. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Mustopa (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tawuran antar pelajar didorong oleh beberapa faktor, yaitu pendorong struktural, ketegangan, penyebarluasan permusuhan, mobilisasi anggota, pemicu, dan tak bekerjanya pengendalian sosial. Mayoritas siswa yang terlibat dalam tawuran adalah siswa yang sedang duduk di kelas I dan II. Sedangkan siswa kelas III meskipun terlibat, tapi jumlahnya tidak mendominasi. Karena mereka konsentrasi dengan ujian yang akan dihadapinya. Dari beberapa faktor penyebab di atas, menurut Mustopa, ada dua penyebab utama munculnya tawuran, yaitu siswa merasa direndahkan oleh pihak lain dan ikut-ikutan membela teman sekolah dan teman sekelasnya.

Data di atas menunjukkan bahwa, gejala tawuran dan penyimpangan nilai di kalangan siswa (remaja) cukup besar, meskipun secara gradual dari tahun 1998-2001 tawuran mengalami penurunan. Realitas ini terjadi karena siswa tidak memiliki tabatan jiwa yang kuat. Kegersangan jiwa di kalangan siswa berakibat fatal. Mereka lebih beragresif, sehingga mereka tidak

memikirkan resiko dari tindakannya bagi dirinya, orang lain, dan kerukunan umat.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, baik konflik dikalangan siswa maupun konflik antar etnis memunculkan format pengendalian terpadu. Dikalangan siswa format tersebut diantisipasi melalui pendidikan budi pekerti di sekolah. Proses pendidikan budi pekerti mutlak diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Namun pendekatan yang dipakai oleh tenaga pendidik tidak mutlak melalui pendekatan verbalis-normatif doktriner. Tenaga pendidik harus memperhatikan segala aspek dan perlu merumuskan nilai (budi pekerti) seperti apa yang akan ditransformasikan dan disosialisasikan kepada anak, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dalam kehidupan anak. Sehubungan dengan ini, menurut Surakhmad, pendekatan-pendekatan dipakai untuk menumbuhkan nilai-nilai hidup dalam tingkah laku manusia harus memiliki nilai dan menyentuh kebutuhan manusia. Jika pendekatan tersebut tidak digunakan, besar kemungkinan akan menghasilkan manusia yang munafik, dan akhirnya menjadi bangsa yang munafik (Surakhmad: 1980: 2).

Lebih lanjut, Surakhmad menggagas bahwa, prinsip-prinsip yang berimplikasi metodologis yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan tingkah laku terpola adalah prinsip pembinaan diri, berkesinambungan, tugas masa depan, tingkat kesiapan, internalisasi dan individualisasi, sosialisasi, konsistensi dan koherensi, sebab akibat, integrasi, lingkungan yang kondusif, komprehensif, obyektivitas, dan intervensi (Surakhmad: 33-38). Prinsip-prinsip ini berintegrasi, tidak dapat dipisahkan. Semua prinsip menyatu dan memiliki kontribusi besar bagi prinsip lainnya. Prinsip-prinsip ini mengingatkan bahwa sekolah memiliki andil besar dalam menanamkan budi pekerti kepada pada siswa. Di sekolah, kata Dreeben, selain belajar membaca menulis dan berhitung, seorang siswa mempelajari aturan kemandirian (*independence*), prestasi (*achievement*), universalisme (*universalism*), dan spesifikasi (*specificity*) (Sumartana,dkk: 2001: 261). Dalam proses belajar mengajar, Posumah-Santoso, mengingatkan bahwa guru adalah kunci keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak didik. Dengan kata lain, guru sebagai orang yang menjembatani kurikulum dan anak muridnya. Guru adalah yang bisa ditiru. Guru harus mampu memberi teladan. Tugas guru,

tidak hanya sebagai penyalur ilmu pengetahuan (unsur *kognitif*), tetapi juga mampu memberi teladan kepada siswa di sekolah dan juga mampu memberi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, dan masyarakat (Sumartana,dkk: 291-292). Meminjam istilah yayanan De Britto, tugas utama pendidik adalah "menjadikan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab" (Kunto, peny.:1999: 6)

Berdasarkan tugas dan tanggung yang besar di pundak seorang guru (bahkan guru pendidikan budi pekerti dan guru agama), guru menjadi sorotan utama keberhasilan dan kegagalan sebuah institusi pendidikan. Jika peran seorang guru gagal, ditambah lagi kegagalan orang tua sebagai guru dalam *atmosphere* keluarga, maka bencana dan malapetaka besar akan menimpa generasi muda. Untuk mengobati kegagalan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Sinyalemen ini selalu menguak ke permukaan, baik dalam institusi pendidikan (sekolah) maupun keluarga. An-Nahlawi menggambarkan bahwa umat manusia dewasa ini tengah dilanda penyakit *kehilangan anak* (An-Nahlawi: 1992: 29). Pernyataan an-Nahlawi tidak dapat dianggap sepele, karena secara keseluruhan, institusi pendidikan harus melakukan reformasi, baik pada komponen tenaga pendidik, metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan di lingkungan keluarga (termasuk masyarakat), jaringan pengendalian sosial, maupun kurikulum.

Format pendidikan budi pekerti harus memperhatikan gejala kejiwaan siswa yang secara psikologis sedang mengalami masa pubertas. Pada periode ini, tambatan jiwa (jiwa agama) memiliki arti penting. Kepercayaan diri dan tambatan jiwa yang kuat, mereka akan memunculkan sikap dan perilaku yang baik. Refleksi jiwa mempengaruhi sikap perilaku terhadap lingkungannya. Untuk itu, usaha membentuk sikap dan tingkah laku menjadi perhatian serius. Surakhmad mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: *Pertama*, terjadinya dinamika pembentukan sikap dan perilaku secara tidak menentu, grafiknya naik dan turun. *Kedua*, aspek pengaruh perlu dimaksimalkan (*reinforcement*). *Kedua*, gejala-gejala perubahan yang dapat diamati dalam waktu yang relatif cepat maupun waktu yang lama. Perubahan-perubahan positif perlu diadakan usaha-usaha penguatan dan penyegaran secara periodik dan berkesinambungan sesudah pengaruh pertama diperkenalkan (Surakhmad: 18-19).

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa pendidikan budi pekerti di sekolah harus memperhatikan ajaran agama, karena ajaran agama termaktub dalam kitab suci. Dalam konteks Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi sumber awal. Ajaran agama dijadikan sebagai kerangka idealistik-normatif doktriner. Oleh karena itu, format pendidikan budi pekerti dibingkai oleh unsur-unsur agama.

Proses Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti

Menempuh jalan hidup bermoral pada dasarnya bukanlah keharusan yang dipaksakan dari luar diri manusia. Sebaliknya, ia merupakan bagian sifat manusia sendiri, sehingga menempuh jalan hidup bermoral tidak lain daripada memenuhi *natur*nya sendiri. Hal ini disebabkan karena manusia menurut kejadian asalnya adalah makhluk *fitrah* yang suci dan baik, dan karenanya berpembawaan kesucian dan kebaikan. Karena kesucian dan kebaikan itu *fitri* dan alami bagi manusia, ia membawa rasa aman dan tenang dalam dirinya. Sebaliknya, kejahatan adalah tidak *fitri* bagi manusia. Ketidakfitrian tersebut akan membawa manusia kepada rasa kegelisahan dan konflik dalam diri manusia.

Di samping *fitrah*-nya, manusia juga memiliki sifat kelemahan. Sifat ini bukan kejahatan *an sich*, tetapi menjadi pintu bagi masuknya kejahatan pada manusia. Karena kelemahannya itu manusia tidak selalu setia pada *fitrah*-nya sendiri. Meskipun kejahatan lebih disebabkan oleh faktor yang datang dari luar, tetapi karena ia masuk pada manusia melalui suatu kualitas yang inheren pada dirinya, yaitu kelemahan, maka kejahatanpun merupakan bagian dari hakikat manusia, sekaligus hakikat sekunder (hakikat primernya tetap *fitrah*-nya yang suci) (Madjid: 1995: 306).

Tantangan hidup manusia ialah bagaimana ia dapat mengangkat dirinya mengatasi batasan-batasan kultural yang memperkecil kemungkinan ia melakukan pilihan sejati jalan hidup dengan penuh tanggungjawab. Mendekatkan diri kepada sang pencipta menjadi upaya memunculkan kesadaran sosial dan kesadaran ritual. Dalam konteks pendidikan budi pekerti ini, setiap proses pembelajaran harus memunculkan rasa percaya diri (*sense of Integrity*) dan identitas diri (*self of identity*), dan menghindari munculnya sindrom alienasi (Rais: 1991: 112).

Dalam proses pembelajaran, pendidikan budi pekerti diarahkan kepada proses pembebasan manusia dari keterbelengguan nilai, pengingkaran nilai, dan kerusakan tatanan kehidupan. Pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah tidak terlepas dari upaya mempertegas hakikat manusia itu sendiri. Kaitan hakikat manusia —dalam proses belajar mengajar dimaknakan dengan siswa— dengan program pembelajaran menjadi penting. Unsur budi pekerti dalam diri manusia merupakan bagian penting dari hakikat manusia. Manusia dalam paham materialisme sebagai unsur materi. Unsur-unsur materialisme-mekanistik yang kompleksitasnya teridri dari aspek-aspek fisiologis, neurologis, fisika dan biokimia. Kesemuanya ini bekerja di bawah satu sistem "organisasi" yang berpusat pada sistem syaraf pusat (*central nervous system*), yakni *mind*. *Mind* disini lebih mendekatatisyaraf yang bersifat neurologis dan bukan pisik (Jalaluddin: 2001: 16-17). Terlepas hal tersebut, manusia menurut al-Ghazali dan al-Farabi terdiri dari unsur jasad (badan) dan roh atau jiwa. Dengan jasad manusia dapat bergerak dan merasa, sedangkan dengan roh manusia dapat berpikir mengetahui dan sebagainya (Jalaluddin: 17).

Menurut al-Syaibani (1973), manusia memiliki dimensi jasmani, rohani dan roh. Roh (bukan unsur rohani) menurut Langgalung yang dikutip Jalaluddin, adalah unsur *fitrah* ketauhidan pada diri manusia. Untuk mengingatkan ketiga unsur tersebut Tuhan memberikan potensi (*fitrah*) kepada manusia (Jalaluddin: 17). Berkaitan dengan hal inilah, pendidikan budi pekerti di sekolah diberikan dengan tujuan membimbing kesucian *fitrah* dan potensi-potensi yang ada pada diri seseorang. Pendidikan budi pekerti dapat memperindah, menghaluskan, sikap dan perilaku siswa karena siswa memiliki akal dan budi yang kemudian internalisasi nya disesuaikan dengan ajaran agama. Tegasnya, pendidikan budi pekerti tersebut untuk memunculkan perilaku santun kepada guru, orang tua, dan merelefsikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pendidikan budi pekerti yang berkembang sekarang terkesan terlalu monoton dengan unsur-unsur normatif. Di samping itu, proses belajar yang terjadi selama ini lebih banyak menampilkan unsur kognitif-verbalis. Sesungguhnya, unsur ini tetap penting, karena tujuan akhir dari pendidikan budi pekerti adalah menanamkan kerangka normatif-doktriner kepada peserta. Dengan kata lain pendidikan budi pekerti bertujuan

untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang direfleksikan melalui sikap dan perilaku siswa. Peserta didik cenderung diarahkan menghafal materi pelajaran. Akibatnya, unsur sikap dan emosional peserta didik menjadi "mandul". Aspek afeksi dan psikomotor siswa kurang tersentuh.

Kondisi yang menjenuhkan siswa ini terjadi karena tenaga pendidik monoton menggunakan metode. Metode yang digunakan guru lebih banyak metode ceramah. Siswa kurang diberi kesempatan untuk berekspresi, bertanya, dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Siswa menjadi *surface learner processor*. Bahkan guru bersikap "sok" pintar sendiri, tidak menghidupkan suasana demokrasi dalam belajar. Kondisi seperti ini harus cepat dirubah ke arah proses pembelajaran yang dapat menimbulkan gairah belajar, termasuk paradigma belajar dan mengajar.

Persoalan-persoalan yang perlu dibenahi adalah metode atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar, kemampuan mengelola situasi pembelajaran, arah pembelajaran lebih difokuskan kepada unsur afeksi dan memunculkan motorik siswa, dan melibatkan siswa dalam setiap kegiatan belajar. Untuk memperbaharui kondisi belajar konvensional di atas, format yang perlu dikembangkan meliputi.

Menghidupkan Suasana Belajar Aktif (Active Learning)

Proses belajar akan lebih efektif apabila siswa berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan berpartisipasinya siswa, siswa akan mengalami, menghayati, dan menarik makna pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang dialaminya, sehingga hasil belajar akan merupakan bagian dari dirinya, baik perasaannya, pemikirannya, dan pengalamannya. Hasil belajar seperti ini akan lebih lestari dan lebih melekat, di samping kreativitas siswa akan terangsang, berkembang, dan terbina.

Proses belajar mengajar model konvensional hanya menimbulkan hubungan satu arah. Pengetahuan yang disampaikan hanya cenderung transfer pengetahuan, norma, nilai dan budaya. Dalam proses belajar ini, siswa dianggap sebagai *bejana kosong* yang harus diisi sepenuhnya oleh guru. Model ini lebih dikenal dengan istilah *Bank System*, dimana emosi dan perasaan siswa kurang diperhatikan oleh guru. Dalam proses belajar format ini, Hamid menilustrasi falsafah yang dikembangkan adalah guru adalah orang yang paling tahu, guru orang yang paling pintar di kelas, siswa orang

yang serba tidak tahu, guru mengajar dan siswa diajar, guru bertanya dan siswa menjawab, guru sebagai subyek dan siswa selalu sebagai obyek (Hamid: 2001: 150).

Proses yang dikembangkan dalam proses belajar aktif adalah kondisi *participatory learning* atau *active learning*. Siswa dan guru menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat berinteraksi dengan sesamanya, dan dengan guru. Dalam suasana tersebut komunikasi berlangsung tiga arah. Unsur yang perlu dihidupkan adalah perasaan, kehendak, cita-cita, pengalaman, kesenangan, pengetahuan, dan ketrampilan. Dalam proses belajar format ini, metode ceramah dianggap sangat tidak mendukung.

Belajar aktif diawali pernyataan Confucius (Melsilberman: 1996); *What I hear I forget, what I see I remember, dan what I do I understand*. Kemudian ketiga pernyataan tersebut dikembangkan oleh Melsilberman; *What I hear I forget. What I hear and see I remember a little. What I hear, see, discuss and do I acquire knowledge and skill. What I teach I master*.

Menggagas Pelaksanaan (Quantum Teaching)

Pendidikan budi pekerti akan berhasil jika para guru menguasai prinsip-prinsip yang dikembangkan DePorter dengan nama *Quantum Teaching*. Filosofi pengajaran dan strateginya dengan "Maestro" dengan tinjauan TANDUR: Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan (DePorter: 2000: 10). Prinsip-prinsip belajar *Quantum Learning* dipraktikkan di dalam kelas. Keduanya (*Quantum Learning* dan *Quantum Teaching*) dua tahun terakhir menjadi model baru dalam mengajar. Dalam prinsip ini nilai seni belajar dan mengajar lebih dikedepankan.

Proses belajar pendidikan budi pekerti ke depan perlu mengindahkan model DePorter ini. Semua kegiatan dilakukan dengan rasa gembira, menyenangkan, dan tidak membosankan. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengemukakan materi yang bersifat normatif-doktriner, sambil mengkaitkannya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dengan demikian peran dan tanggung jawab guru dapat dilaksanakan dan suasana belajar berkembang menjadi lebih kondusif.

Peran dan tanggung jawab pendidik, sebagai penerima pelimpahan dan perpanjangan tangan orang tua. Goble menyatakan bahwa peranan guru perlu dirubah. Perubahan ini disebabkan oleh: *Pertama*, perubahan orientasi

hidup dan nilai. Perubahan yang cepat menimbulkan pendekatan dan cara baru untuk membimbing anak-anak di sekolah. *Kedua*, sekolah sendiri hendaknya menyesuaikan diri dengan fakta empiris di masyarakat maupun dalam sistem persekolahan. *Ketiga*, pembaharuan proses pendidikan dikalangan para pendidik (Goble: 1983: 2-3). Perubahan peran guru menyebabkan perubahan fungsi sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. Dalam pandangan tradisonal, fungsi sekolah meliputi fungsi pengawasan, fungsi indoktrinasi, fungsi kejuruan, dan fungsi kepercayaan (Goble: 22-23). Ada beberapa prinsip penting yang perlu dirancang guru dalam memberikan materi pendidikan budi pekerti, yaitu:

Pertama, orientasi kepada problem yang ada. Prinsip ini menjadi landasan umum dalam proses pembelajaran. Sebelum mengajar, seorang guru telah mengetahui permasalahan yang dihadapinya, sekurang-kurangnya permasalahan yang dihadapi diketengahkan terlebih dahulu. Problem utama yang diperhatikan adalah problem yang timbul dalam masyarakat.

Kedua, orientasi ilmiah. Mengajar dan belajar hendaknya mempunyai kaitan yang lebih erat dengan riset dibandingkan dengan apa yang terjadi dewasa ini. Orientasi ilmiah adalah proses belajar mengajar secara berkesinambungan sesuai dengan tahap-tahap permasalahan dan kesiapan peserta didik.

Ketiga, orientasi multi-disipliner. Baik dalam mengajar maupun belajar, orientasi yang lebih terarah kepada problem mengasumsikan bahwa berbagai persoalan harus senantiasa dipertimbangkan dari sudut pandangan yang multi disiplin. Persoalan dapat diselesaikan dengan menggunakan cara dan pendekatan yang bervariasi. Suatu masalah yang terjadi di beberapa daerah memungkinkan cara penyelesaian yang berbeda karena struktur sosio-kultur yang berbeda.

Keempat, orientasi metodologis. Orientasi ini disesuaikan dengan sifat dan bentuk permasalahan, geografis, besar kecilnya permasalahan yang dihadapi, tujuan yang diharapkan, di samping pendekatan teknis yang akan diterapkan. Pemecahan masalah merujuk kepada hasil pengamatan awal.

Kelima, pendekatan kemanusiaan. Pemecahan masalah berorientasi pada pendekatan individual dan kelompok. Pendekatan tersebut dapat berupa persuasif dan aksi atau mengkombinasikan kedua-duanya. Pendekatan kombinatorif-akumulatif sejalan dengan paham/aliran konvergensi yang

berkembang dalam dunia pendidikan. Unsur bawaan dan lingkungan dikembangkan secara berhubungan. Perlakuan kolektivitas dan individual akan mewarnai dan membuat suasana lebih variatif.

Keenam, Evaluasi. Proses pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari program evaluasi. Evaluasi bertujuan mengkaji sejauh manakah suatu program mencapai sasaran (keberhasilan). Evaluasi ini menjadi umpan balik (*feed back*). Hasil evaluasi digunakan sebagai materi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program, tolok ukurnya harus jelas dan diyakini keampuhannya. Prinsip yang perlu dikembangkan adalah nilai-nilai kejujuran, obyektivitas, dan keseimbangan.

Prinsip-prinsip di atas disosialisasi secara luas, khususnya kepada pendidik dan peserta didik. Tenaga pendidik sebagai fasilitator, harus mampu membaca kebutuhan peserta didik. Sebagai administrator, ia harus mampu mengelola suasana pembelajaran baik yang berkenaan dengan kurikulum maupun interaksi edukatif antara guru dan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Prinsip-prinsip di atas diaplikasi untuk menghidupkan suasana proses pembelajaran.

Penutup

Dari uraian di atas, pendidikan budi pekerti —terlepas dari perbedaan dan persamaannya dengan pendidikan agama atau pendidikan akhlak— memiliki makna signifikan dalam proses belajar mengajar. Pendidikan budi pekerti masa mendatang perlu diformat agar lebih menyentuh unsur afeksi dan psikomotorik siswa. Transfer pengetahuan unsur kognisi siswa perlu dilakukan dengan mengintegrasikan kedua unsur lainnya. Proses pembelajaran pendidikan budi pekerti perlu didekatkan dengan model belajar mengajar format baru, seperti model *active learning*, *quantum learning* dan *quantum teaching*. Model ini perlu disosialisasikan agar dapat dipahami oleh tenaga pendidik khususnya dan orang-orang yang memiliki komitmen dalam dunia pendidikan.

Daftar Pustaka

- Al-Abrasyi, Athiyah. 1970. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. Bustami A. Gani & Johar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.

- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1992. *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam Dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DePorter, Bobbi. 2000. *Quantum Teaching: Orchestrating Student Success*. Terj. Ari Nilandari. Bandung: Kaifa.
- Goble, Norman N. 1983. *Perubahan Peranan Guru*. Terj. Suryatin. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hamid, Farida. 2001. "Urgensi Penerapan Belajar Aktif (Active Learning). Dalam Proses Belajar Mengajar". Dalam *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dib* Vol. IV. No. 01, Maret 2001. Palembang: Fakultas Tarbiyah.
- Hendropuspito, D. 1990. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jalaluddin. 2001. *Teologi Pembebasan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kunto, A, et. All. 1999. *Pendidikan Bebas Menuju Pribadi Mandiri*. Yogyakarta: Yayasan De Britto.
- Madjid, Nurcholis. 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina
- Melsilberman. 1996. *101 Strategies to Teach Any Subject*. Massachusetts: A Simon & Schuster Company.
- Rais, M. Amin. 1991. *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Sedyawati, Edi, et.al. 1997. *Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarsono. 1991. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sumartana, dkk. 2001. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Mewujudkan Nilai-Nilai Hidup dan Tingkah Laku*. Bandung: Tarsito.
- UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Tylor, et. al. 1997. *Educational Policy and the Politic of Change*. Routledge: London.